

Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah

Agus Herlambang¹

Abstrak

Sebagai negara yang merdeka dengan ekonomi terpusat, menjadikan Suriah sebagai negara yang patut dicontoh oleh negara di dunia. Terbukti bahwa tanpa neoliberalisme dan dominasi ekonomi Barat, Suriah mampu meningkatkan kondisi hidup dan berkembang secara mandiri. Sistem politik Suriah tentu membutuhkan reformasi dan modernisasi. Namun, konflik internal antara pemerintah dengan kelompok oposisi yang telah berkecamuk selama enam tahun ini, semakin rumit karena kekisruhan bukan hanya terkait revolusi, demokrasi dan modernisasi seperti yang diinginkan oleh rakyat Suriah, tetapi ketidaksukaan negara Barat dan Teluk terhadap rezim Assad. Mereka ingin menggulingkannya telah membawa Suriah ke dalam kehancuran yang sangat parah. Pada setiap konflik yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat sipil, tidak sedikit masyarakat sipil yang telah menjadi korban dari pertempuran.

Kata Kunci:

Suriah; Konflik; ISIS.

A. Pendahuluan

Negara Suriah modern didirikan setelah Perang Dunia I sebagai mandat Perancis. April tahun 1946, Suriah merdeka sebagai sebuah negara republik parlementer. Pasca kemerdekaan itu, Suriah mengalami kekacauan yang sebagian besar disebabkan oleh upaya kudeta, pada periode 1949—1971. Hafez Al-Assad, kemudian disetujui sebagai Presiden Suriah, melalui referendum (1971—2000) (Mansyur, 2014). Bersama saudaranya Rifyad Assad membawa Suriah

melewati masa-masa sulit Perang Enam Hari melawan Israel tahun 1967. Setelah Hafez Al-Assad meninggal pada tahun 2000¹, transisi pemimpin segera digantikan oleh putranya, Bashar Al-Assad, 17 Juli 2000 sampai dengan sekarang (Ghafur, 2016, hlm. 41-42). Rezim Assad didukung oleh Partai Ba'ath² yang didirikan pada 7 April 1947 di Damaskus oleh Michel Aflaq³ (Christian), Salah al-Din al-Bitar (Sunni Muslim) dan Zaki al-Arsuzi (Alawite).

Total luas wilayah Suriah adalah 185.180 km² persegi dengan mayoritas

¹ Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS, untuk keperluan akademik yang bersangkutan dapat dihubungi melalui Email aheryess@yahoo.com.

Gurun (CIA, 2018). Letaknya yang strategis dengan limpahan potensi kekayaan alam menjadikan Suriah sebagai negara yang diperebutkan berbagai kekuatan politik regional dan global. Mayoritas suku di Suriah adalah Arab dengan persentase 90,3%, sisanya suku Kurdi, Armenia dan lain-lain dengan persentase 9,7% (CIA, 2016). Dari seluruh penduduk Suriah, pemeluk Islam ada 87% (Sunni 74% dan Syiah 13%, yang menguasai pemerintahan rezim Assad) (Ghafur, 2016, hlm. 48) penganut Kristen sekitar 9%, dan pengikut Druze berjumlah 3-7% (CIA, 2018).

Sebagai negara yang merdeka dengan ekonomi terpusat, menjadikan Suriah sebagai negara yang patut dicontoh oleh negara di dunia. Terbukti bahwa tanpa neoliberalisme dan dominasi ekonomi Barat, Suriah mampu meningkatkan kondisi hidup dan berkembang secara mandiri. Sistem politik Suriah tentu membutuhkan reformasi dan modernisasi, namun konflik internal antara pemerintah dengan kelompok oposisi yang telah berkecamuk selama enam tahun terakhir bukan lagi tentang reformasi, demokratisasi ataupun modernisasi (Maupin, 2016).

Transisi kepemimpinan dari Hafez Al-Assad ke Bashar Al-Assad pada tahun 2000, membuat rakyat menaruh harapan besar akan adanya reformasi politik yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan di Suriah. Dibawah Assad perekonomian Suriah mengalami banyak kemajuan, yang mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri sejak tahun 2006. Namun kemajuan ekonomi di Suriah tidak memberi jaminan akan kebalnya Suriah terhadap revolusi, karena korupsi yang telah mengakar di

lingkungan elit politik. Negara ini mulai kesulitan mencapai kebutuhan nasionalnya ketika bencana kekeringan ekstrim melanda kawasan Timur Tengah (Ahmad, 2015).

Kondisi yang perlahan memperburuk perekonomian telah menimbulkan frustrasi di tengah masyarakat, yang akhirnya menginginkan terjadinya perubahan di Suriah. Hal ini disebabkan karena, Presiden Assad tidak berbuat banyak untuk meringankan dampak bencana itu. Faktor lain dari timbulnya konflik Suriah adalah masalah ke sekterian. Puncak frustrasi yang dialami masyarakat Suriah diawali dengan aksi pembakaran diri oleh Hasan Ali Akleh pada 26 Januari 2011 yang terinspirasi dari kasus pembakaran diri di Tunisia. Aksi ini menimbulkan rasa marah dihati masyarakat, namun seolah belum kering luka lama, pada 6 Maret 2011 muncul perlawanan di Kota Deraa, dilakukan oleh para orang tua yang anak-anaknya di tahan oleh polisi setempat karena membuat grafiti dengan tulisan *As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam* (Rakyat ingin menumbangkan rezim). Lima belas orang anak yang ditahan tersebut disiksa saat berada di dalam penjara.

Hal tersebut menyulut emosi rakyat Suriah, sehingga melahirkan demonstrasi yang lebih keras terhadap pemerintah. Demonstrasi ini ditanggapi pemerintah dengan kekerasan. Kemudian kejadian ini menjadi berita utama di media massa internasional terutama media mainstream yang melaporkan berita dengan sedemikian *massive*, tanpa melihat fakta dan mengaburkan kebenaran. Menyebutkan bahwa demo di kota Deraa dihadapi secara brutal oleh rezim Assad. Sejak saat itulah stigma kebrutalan Assad dalam menghadapi

demonstran damai menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menimbulkan kecemasan dari dunia internasional terhadap pemerintah Assad untuk segera menghentikan kekerasan yang dilakukan rezim.

Upaya untuk menggulingkan presiden Bashar Al-Assad yang terus dilakukan sejak Maret 2011, selain kelompok oposisi sampai pihak Barat seperti: AS, Perancis, Inggris, Uni Eropa dan Kanada yang menyerukan kepada Assad untuk meletakkan jabatannya. Namun, terpilihnya kembali presiden Bashar Al-Assad di tahun 2014, membuktikan bahwa pemerintah Assad masih didukung oleh sebagian besar rakyat, tokoh-tokoh agama dan kekuatan militer sehingga upaya menggulingkan Assad dinilai cukup sulit. Tentara Suriah atau SAA (*Syrian Arab Army*) merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Assad dalam menghadapi tekanan kuat dari kelompok-kelompok oposisi selama ini. Dengan tetap memerangi teroris yang menduduki beberapa kota di Suriah, Presiden Assad yakin bisa merebut kembali negaranya yang terkoyak oleh perang.

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek domino dari fenomena *Arab Spring*⁴ yang melanda kawasan Timur Tengah pada tahun 2010. Berbeda dengan yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, konflik di Suriah relatif lebih lama dan masih berlangsung sampai saat ini.

B. Kerangka Teoritik

Esensi negara itu kedaulatan, dimana kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kedaulatan

teritorial yakni penguasaan suatu daerah teritorial, dimana terdapat hukum yang berlaku atas wilayah teritorialnya pada kekuasaan negara tersebut. Bahwa negara dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan atau intervensi dari negara lain. Namun, Suriah yang terperangkap dalam konflik yang disinyalir ada keterlibatan kekuatan dan kepentingan asing.

Konflik berasal dari bahasa latin "*conflictus*", yang mempunyai arti pertentangan atau perkelahian. Menurut Peter Wallensteen mengkategorikan tiga tipe konflik internasional, yaitu: 1) Konflik antar negara (*interstate conflict/ international conflict*), 2) Konflik internal (*intra-state conflict/internal conflict*), yang memiliki dimensi secara internasional, 3) Konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*)" (Wallensteen, 2002, hlm. 8). Sedangkan Michael E. Brown melihat konflik internal, sebagai: Kekerasan atau pertikaian politik yang penyebab utamanya karena faktor domestik ketimbang faktor sistemik dimana pertikaian itu melibatkan kekerasan dengan penggunaan senjata yang terjadi di dalam sebuah Negara (Brown, 2008, hlm. 186-187).

Dalam kaitannya konflik yang terjadi di Suriah, merupakan konflik internal yang terjadi antara pihak oposisi dengan pihak pemerintah. Terjadinya konflik internal di Suriah karena adanya ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa. Menurut Brown, bahwa memahami konflik internal sangatlah penting karena sering kali melibatkan Negara-negara tetangga sehingga menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah negara tetangga atau pemberontak yang mencari

perlindungan ke negara yang berbatasan langsung menimbulkan masalah baru yang tidak mudah diselesaikan karena tidak hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya, dan keagamaan (Brown, 2008, hlm. 188-189).

Berikut adalah tabel sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu konflik internal menurut Michael E. Brown:

Tabel 1. Sebab-sebab Pemicu Konflik

Sebab-sebab Utama (Underlying Causes)	Sebab-sebab Pemicu (Proximate Causes)
<p>Faktor-faktor Struktural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara yang lemah • Kekhawatiran tentang keamanan internal • Geografis etnis 	<p>Faktor-faktor Struktural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara yang sedang runtuh/gagal • Perubahan perimbangan kekuatan militer • Perubahan pola-pola demografi
<p>Faktor-faktor Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Politik yang diskriminatif • Ideologi nasional yang eksklusif • Politik antar-kelompok • Politik Elit 	<p>Faktor-faktor Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transisi politik • Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh • Persaingan antar kelompok yang semakin tajam • Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam

<p>Faktor Ekonomi/Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah ekonomi • Sistem ekonomi yang diskriminatif • Pembangunan ekonomi & modernisasi 	<p>Faktor Ekonomi/Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah ekonomi yang semakin parah • Ketimpangan ekonomi yang makin lebar • Pembangunan ekonomi & modernisasi yang cepat
<p>Faktor Sosial Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola diskriminasi budaya • Sejarah kelompok yang bermasalah 	<p>Faktor Sosial Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat • Penghinaan etnis dan propaganda

Sumber: Brown, 2008, hlm. 205.

Sedangkan Edward Azhar mengemukakan teori *Protracted Social Conflict* (PSC) atau konflik sosial yang berkepanjangan. Ada empat pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya konflik yakni:

1. *Communal content*, dalam kaitannya dengan pra-kondisi yang menjadi pemicu terjadinya konflik adalah hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas suku, agama, dan budaya tertentu dengan negara.
2. *Deprivation process*, kondisi ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar

- kemanusiaan sehingga terjadi proses pemiskinan secara sistematis.
3. *Governance characteristic*, pra-kondisi terjadinya konflik selanjutnya disebabkan oleh karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi rakyat.
 4. *International Linkages*, kelompok pra-kondisi yang berkaitan dengan poin ini adalah sistem ketergantungan yang terjadi antar suatu negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal (Hermawan, 2007, hlm. 87-89).

Sementara Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Zero Sum Game* (konflik menangkan-kalah), merupakan konflik yang bersifat antagonistik, sehingga tidak memungkinkan adanya kompromi maupun kerjasama antar pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. *Non Zero Sum Game* (konflik menang-menang), merupakan situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih memungkinkan untuk melakukan kompromi dan kerjasama (Subakti, 1992, hlm. 169).

C. Pembahasan

Perang di Suriah bukanlah konflik internal, melainkan perang yang telah dikenakan pada Suriah oleh Israel, AS, dan

negara-negara kapitalis Barat lainnya, karena dianggap sudah menghalangi kepentingan AS dan sekutunya. Konflik di Suriah memiliki keunikan dibandingkan dengan konflik-konflik lain sepanjang sejarah, yaitu penggunaan media online yang sangat masif. Foto-foto dan video yang disebarluaskan dengan tujuan menginformasikan kepada dunia bahwa rakyat Suriah tertindas oleh rezim Assad dan Rusia (Sulaeman, 2017, hlm. 15).

Ada tiga target utama dari konflik yang melanda Suriah sekarang. *Pertama*, menghancurkan Suriah. *Kedua*, mendistorsi dan mencoreng wajah Islam di mata dunia sebagai agama yang menyeramkan sekaligus menakutkan agar mereka menjauh dari risalah ini (Al-Buthi, 2015). Dan yang *terakhir*, adalah menjalankan kebijakan luar negeri Israel yang didukung oleh negara-negara Barat dan sekutunya.⁵ Propaganda media Barat dan sekutu yang selama ini memberitakan Suriah hanya berdasarkan satu narasi yaitu “Assad dan koalisi telah memeborbardir warga sipil Suriah.” Data dibawah ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah tidak lebih dari perebutan sumber energi minyak dan gas.

1. Pipa Gas dan Geopolitik

Suriah merupakan salah satu negara yang memegang infrastruktur jaringan minyak mentah dan pipa gas dengan posisi geopolitik yang penting bagi perekonomian di Timur Tengah. Wilayah ini merupakan pintu masuk dan keluar jaringan pipa trans-benua. Pada tahun 2000, Qatar mengusulkan kepada Bashar al-Assad untuk membangun pipa gas sepanjang 1.500km melalui Arab

Saudi, Jordania, Suriah dan Turki (Kennedy, 2016). Uni Eropa yang bergantung kepada gas Rusia, berusaha mencari pemasok gas dengan harga lebih murah. Aspirasi itu, selaras dengan keinginan Qatar (Austin, 2015).

Gambar 1. Peta Jalur Pipa Gas Qatar-Arab Saudi-Yordan-Turki vs Iran-Irak-Suriah



Namun, pada tahun 2009, Bashar al-Assad mengumumkan bahwa Suriah akan menolak menandatangani perjanjian yang diusulkan Qatar untuk melindungi kepentingan sekutunya Rusia (Kennedy, 2016). Assad kemudian memilih bersepakat dengan Iran dengan membangun jalur pipa gas melalui Iran-Irak-Suriah. Bagi Iran sendiri, Suriah adalah jalur kunci menuju Eropa lewat Laut Tengah. Iran ingin membangun jalur distribusi minyak dan gas ke Eropa dengan membangun jalur pipa energi melalui Suriah.

Iran juga ingin menancapkan pengaruh kuatnya di Suriah yang berbatasan langsung dengan Lebanon di mana Hizbullah menjadi salah satu aktor terkuat di kawasan ini dan menjadi sekutu utama Iran dalam menghadapi Israel. Iran berkepentingan menyangga Assad karena jika Assad

tumbang, maka tamatlah petualangan Iran di Timur Tengah. Aspirasi Iran itu dalam selaras dengan Rusia yang telah menjadi sekutu tradisional Suriah sejak era Uni Soviet. Rusia berkepentingan menghambat jalur pipa gas Qatar-Arab Saudi-Suriah-Turki-Eropa yang sudah pasti mengancam dominasi gasnya di Eropa (Austin, 2015). Membiarkan Eropa mendapatkan alternatif gas yang lebih murah adalah mimpi buruk bagi Rusia. Hal ini yang kemudian menimbulkan kemarahan dari negara Barat dan Teluk.

Pada tahun 2009 menurut *Wikileaks*, segera setelah Bashar al-Assad menolak pipa Qatar, *Central Intelligence Agency* (CIA) mulai mendanai kelompok oposisi di Suriah (Kennedy, 2016). Sebagian besar jumlah dari pemberontak di Suriah merupakan orang asing yang telah direkrut untuk melawan pemerintah Suriah. Fasilitas pelatihan teroris diberikan oleh negara Amerika dan sekutu serta negara Teluk. Rezim AS dan sekutu serta Turki dan Arab Saudi secara terbuka mendukung *Front Jabhat al-Nusrah*, organisasi al-Qaeda yang telah menewaskan puluhan ribu orang tak berdosa di Suriah. Sementara itu media barat telah memberitakan tuduhan bahwa pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia, yang kemudian hal ini di luruskan oleh Carla Del Ponde wakil dari PBB yang menegaskan bahwa pemberontak yang didukung asing yang telah menggunakan gas sarin saraf dan senjata kimia lainnya (Kennedy, 2016).

2. Keterlibatan dan Kepentingan Negara-negara Barat dan Teluk di Suriah

Koalisi Assad

Rusia. Hubungan diplomatik antara Rusia-Suriah telah terjalin sejak lama yang diperkuat dengan adanya pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Tartus yang sudah ada sejak masa Uni Soviet, dan masih di gunakan hingga saat ini. Adapun keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah merupakan atas undangan dari Presiden Assad yang meminta bantuan untuk membebaskan negaranya dari kelompok terorisme. Sedangkan bagi Rusia, Suriah merupakan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, kedua negara ini sejak lama telah menjadi mitra untuk ekspor-impor persenjataan militer. Dengan membantu Suriah, Rusi memiliki tujuan untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah serta untuk mempertahankan mitra ekonomi dan militernya.

Iran. Merupakan salah satu negara yang menolak hadirnya Israel. Hal ini selaras dengan Suriah yang menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang tetap teguh untuk melawan zionis Israel. Apabila, Suriah tumbang maka dikhawatirkan Iran akan menjadi lebih mudah untuk ditaklukan oleh Israel dan Sekutunya. Untuk itu, Iran mulai mengirimkan pasukan tentara dan penasihat militernya ke Suriah.

Cina. Negara Suriah merupakan salah satu eksportir utama minyak Cina setelah Arab Saudi dan Iran. Suriah juga berperan sebagai pintu masuk pasar ekspor komoditas Cina ke negara-negara di Timur Tengah. Cina juga menjaga hubungan baiknya dengan Iran sebagai negara pemasok utama kebutuhan minyak Cina (ABM., 2013, hlm. 196-197).

Aliansi di antara ketiga negara besar ini sangat berpengaruh di dunia internasional,

khususnya Rusia, Iran, Cina yang menolak segala macam bentuk militer asing terhadap Suriah telah berlangsung sangat efektif untuk mencegah Suriah mengalami kejadian serupa seperti Libya (ABM., 2013, hlm. 198).

Koalisi Barat dan Teluk

Amerika Serikat. Merupakan negara yang mendukung pergantian rezim di Suriah guna mempertahankan kepentingan politik-ekonomi di Timur Tengah. Rezim Al-Assad dinilai telah menjadi batu sandungan AS dalam mendukung langkah-langkah Israel. AS membantu proses revolusi di Suriah dengan memberikan bantuan kepada kelompok oposisi baik berupa finansial maupun logistik (ABM., 2013, hlm. 198).

Uni Eropa (UE). Menjelang Konferensi Perdamaian Jenewa II, UE sepakat untuk mengizinkan pengiriman senjata kepada kelompok oposisi Suriah. Keputusan ini diambil setelah anggota UE gagal untuk memperbaharui embargo senjata ke Suriah. UE menilai pengiriman senjata kepada oposisi akan mendorong Pemerintah Assad untuk memulai perundingan penyelesaian masalah konflik.

Prancis. Terlihat sangat berambisi untuk kembali menancapkan kekuasaan imperialismenya di Suriah, dengan kedok “membantu bangsa Suriah lepas dari kediktatoran Assad.” Prancis sangat aktif dalam menggalang bantuan internasional bagi kelompok oposisi, termasuk mendorong AS, Inggris, dan NATO untuk mengirimkan pasukan ke Suriah. Besarnya keterlibatan Prancis dalam upaya menggulingkan Assad terlihat juga dari bendera yang digunakan kelompok oposisi. Bendera itu berwarna hijau-putih-hitam dengan tiga bintang di

tengah, persis seperti bendera Suriah saat masih berada di bawah mandat Prancis (Sulaeman, 2013, hlm. 112).

Arab Saudi. Salah satu negara yang mendukung perubahan rezim di Suriah. Runtuhnya rezim Assad dapat mengakhiri pengaruh Iran di kawasan yang merupakan rival utama Saudi. Menghindari konfrontasi langsung dalam konflik dan hanya memberikan bantuan finansial dan senjata bagi kelompok oposisi.

Turki. mendukung kelompok oposisi yaitu *Syrian National Coalition for Revolutionary and Opposition Force* dan *Free Syrian Army*. Serta masalah militer Kurdi, selama ini rezim Assad memberikan perlakuan khusus kepada minoritas Kurdi yang ditentang Turki. Tumbanganya Assad akan mengurangi bantuan Suriah terhadap bangsa Kurdi.

Libanon dan Hizbullah. Libanon merupakan negara strategis bagi Suriah secara ekonomi-politik dan kemanan, terutama dalam mengahdapai Israel. Pemerintah Assad menegaskan Suriah dan Hizbullah kini berada dalam satu barisan. Hizbullah diperkirakan telah mengirim 3000-4000 milisi untuk membantu pasukan rezim Assad.

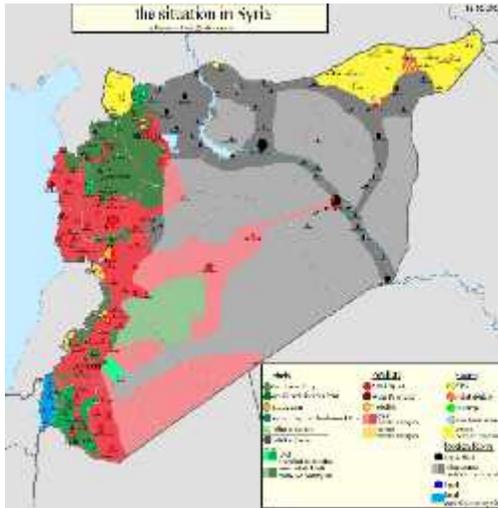
Negara-negara Teluk (GCC). Enam negara Teluk Arab melakukan aksi meningkatkan sanksi terhadap Suriah dengan melarang impor minyak dari negara itu untuk sementara waktu, tentu hal ini akan menyulitkan pemerintah Assad dimana pemasukan dari minyak merupakan 25% dari keseluruhan pemasukan Suriah. Usaha sekutu Barat adalah menutup kedutaan besarnya di Suriah antara lain Arab Saudi, Uni Emirates Arab, Bahrain, Oman, Qatar

dan Kuwait, Disusul oleh Jepang dan Turki. Qatar ikut serta dalam menutup kedutaan besarnya di Suriah dikarenakan Suriah telah menolak keinginan Qatar untuk membangun pipa gas Qatar-Saudi-Turki-Eropa.

Israel. Mengambil keuntungan secara politik dan ekonomi dari konflik Suriah. Upaya merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang kaya akan Sumber Daya Alam, Israel yang merupakan sekutu abadi Amerika Serikat dan berbatasan langsung dengan Suriah, sangat menginginkan konflik internal Suriah terus berlangsung. Instabilitas Suriah berarti keamanan bagi Israel. Dengan kondisi ini, Suriah disibukkan dengan permasalahan internalnya dari pada konflik berkepanjangan dengan Israel (ABM., 2013, hlm. 198).

3. Situasi Internal Suriah Pada saat Konflik

Setelah ISIS, *Jabhat al Nusrah* berhasil menduduki Suriah di tahun 2012, daerah teritorial pemerintah semakin mengecil. Di tahun 2015, pemerintah Suriah menguasai sekitar 50 persen dari total luas wilayah, tetapi hanya terdapat sekitar 22 sampai 72 persen populasi yang tersisa di dalam wilayah Suriah. Sementara, pemberontak menguasai 45 persen wilayah dan 17 sampai 34 persen dari populasi, sedangkan bangsa Kurdi mengontrol tidak lebih dari 5 persen dari wilayah dengan 5 sampai 10 persen dari populasi (Beauchamp, 2015).

Gambar 2. Situasi Suriah pada tahun 2015

Sumber: *University of Texas Libraries, Syria Maps.*

Berbagai faksi kelompok bersenjata melancarkan serangan bom, mortir, dan aksi bom bunuh diri agar dapat menguasai kota-kota di Suriah. Target utama serangan mereka antara lain, airport, kantor-kantor polisi, gudang penyimpanan senjata militer (Sulaeman, 2017, hlm. 26). Data dari *The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa sebagian kelompok oposisi ekstrem melakukan kegiatan penculikan untuk meminta tebusan, pemboman fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, menyiksa dan memenggal korban, selain itu pemberontak telah merekrut ribuan tentara anak untuk ikut berperang menggulingkan rezim Assad (Davison, 2016). Biasanya anak-anak digunakan untuk pembuatan video atau film propaganda yang memperlihatkan penderitaan masyarakat Suriah akibat perang. Tentara Suriah (*Syrian Arab Army*), dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok jihadis dan berupaya

keras untuk mempertahankan kota. Hal yang tidak dapat dihindarkan kemudian adalah pertempuran di berbagai kawasan (Sulaeman, 2017, hlm. 27).

Data dari *Syrian Center for Policy Research* (SPCR) menunjukkan bahwa korban tewas sejak enam tahun berkonflik adalah 470.000 orang, sedangkan 600 orang lainnya terluka dan cacat. Sejak permulaan konflik jutaan warga Suriah telah menjadi pengungsi. Data terakhir dari *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang diambil pada 7 November 2016, sebanyak 8,7 juta telah menjadi pengungsi di dalam negeri dan 4,83 juta tersebar di negara-negara lain, seperti Turki, Jordan, Lebanon, dan Eropa (Islam Indonesia, 2016). Sedangkan, Pada 2015, PBB memperkirakan jumlah korban yang tewas sedikitnya 220.000 orang selama konflik berjalan, tetapi hampir setengah dari korban tewas adalah prajurit tentara Suriah atau pejuang milisi setempat yang bersekutu, dan dua pertiga adalah jihadis atau pejuang oposisi jika kita menghitung kelompok oposisi dan jihadis. Artinya, rasio jumlah korban dari kalangan sipil oleh militer kira-kira 1:2, mengingat bahwa oposisi juga menimbulkan korban sipil. Bandingkan dengan rasio korban AS di konflik Irak sekitar 3:1 dan korban dari Israel yang menyerang Gaza sekitar 4:1 di tahun 2008-2009 (Larudee, 2015).

Sebagian besar tragedi yang terjadi di Suriah adalah propaganda Barat untuk mendukung cita-cita berdirinya negara Israel yaitu mewujudkan Israel Raya di Timur Tengah. Sebetulnya, proyek Israel Raya ini sudah terbentuk jauh sebelum negara Israel terbentuk, dan proyek Israel Raya ini benar-benar dilaksanakan semenjak Israel meminta

tanah di Palestina dan PBB mengamininya pada tahun 1948. Propaganda Barat (AS) dan Israel ini telah melahirkan penderitaan bagi bangsa Suriah. Ratusan ribu jiwa rakyat sipil melayang terjepit ditengah penangan dingin rezim Assad dan kebiadaban teroris pemberontak yang melakukan pembersihan etnis dan genosida, sebuah tragedi kemanusiaan yang belum terlihat tanda-tanda akan usai.

Semua warga Suriah, hanya menginginkan perdamaian. Mereka memiliki kenangan atas Suriah sebelum berkonflik, adalah negara yang indah, stabil, aman, makmur, dan sekuler. Tidak ada ‘pemerintah islamis’ (ala-teroris) dan semua menginginkan penyelesaian konflik melalui langkah politik dan diplomatik. Kelompok oposisi pro-demokrasi yang awalnya menginginkan revolusi dan modernisasi serta menggulingkan Assad, kini telah berbalik dengan ikut serta mendukung Presiden Assad untuk mengusir kelompok jihadis atau terorisme pergi dari wilayahnya.

D. Penutup

Konflik internal di Suriah muncul pada awal Maret 2011 saat sejumlah pemuda Deraa menulis dengan kata-kata anti pemerintah. Setelah itu mereka ditangkap oleh kepala sekolah, dan dinas intelejen serta di penjarakan. Pemerintah mengumumkan pembentukan komite investigasi pada 24 Maret 2011, dan pemerintah Bashar memerintahkan agar seluruh demonstran yang ditahan untuk dibebaskan. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemarahan orang tua yang anaknya dipenjarakan, maka demonstrasi tidak dapat dihindari menjadi semakin meluas. Kemudian tercetus untuk

membentuk oposisi guna menurunkan rezim penguasa.

Kelompok oposisi yang terbentuk dalam konflik ini terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, kelompok oposisi pro-reformasi, antara lain: (1) Kelompok oposisi yang tergabung dalam FSA (*Free Syrian Army*) yang dipimpin oleh Kolonel Riadh Assad. Merupakan kelompok angkatan bersenjata pihak oposisi yang anggotanya terdiri dari mantan militer Assad yang membelot dan sukarelawan rakyat sipil. Kelompok ini mendapat dukungan senjata dan dana dari AS; (2) SNC atau sekarang lebih dikenal dengan SNCORF (*Syrian National Coalition for Oposition and Revolutionary Force*) dibawah pimpinan Abdul Basith Saida, yang merupakan seorang akademisi Kurdi. Kelompok ini ingin memperluas basis politik kelompok oposisi ditingkat internasional, dan mendukung langkah-langkah penggulingan Assad melalui intervensi internasional; (3) NCC (*The National Coordination Committee for Democratic Change*) yang dipimpin Hassan Abdul Azhim, kelompok ini mendukung perubahan rezim tetapi tidak dengan cara intervensi asing.

Kedua, kelompok oposisi yang muncul dari gerakan Islam Radikal yang juga menentang pemerintahan Bashar Al-Assad, yaitu: (1) Kelompok oposisi radikal pecahan ISIS yaitu *Jabhah Al-Nusrah* yang menginginkan pendirian negara Khalifah; (2) ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang ingin memperluas pengaruhnya di Suriah. Dan merupakan gerakan transnasional yang memiliki anggota di luar Suriah. Kelompok-kelompok tersebut secara nyata didukung oleh negara-negara Arab dan Amerika

Serikat melalui *Syrian Support Group* yang bermarkas di Doha.

Dengan keikutsertaan para kelompok oposisi demokratis dan sekuler pada pemilu dan referendum yang diadakan pada tahun 2011, hal ini membuktikan bahwa pihak oposisi demokratis dan pemerintah Bashar telah berdamai. Namun adanya kelompok oposisi radikal dan teroris seperti FSA, Jabhat al Nusrah dan ISIS membuat konflik di Suriah masih berjalan hingga saat ini. Gencatan senjata yang ditawarkan pemerintah tidak diinginkan oleh para oposisi radikal karena mereka hanya menginginkan konflik yang bersifat *zero sum game* dimana tidak adanya kerjasama atau kompromi dalam konflik.

Catatan Akhir

- ¹ Masa Presiden Hafez al Assad, 22 Februari 1971—10 Juni 2000 dan Abdul Halim Khaddam (presiden sementara): 10 Juni-17 Juli 2000, selanjutnya Bashar al Assad sampai sekarang.
- ² Partai Ba'ath (bahasa Arab: بعث) mulai memegang kuasa di Suriah pada tanggal 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang; Ba'athis memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Setelah penyingkiran pemimpin Baath Saddam Hussein pada perang Irak 2003, pemerintahan yang menduduki Irak melarang Partai Ba'ath pada Juni 2003.
- ³ Michel Aflaq; pendiri partai Ba'ath seorang Katolik Suriah yang semula menganut komunisme.
- ⁴ *Arab Spring* merupakan sebuah fenomena yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang berupa gelombang aksi revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan rezim dan pemimpin yang otoriter. Fenomena ini bermula di Negara

Tunisia, berlanjut ke Mesir hingga Libya dan kawasan lainnya.

- ⁵ *The Oded Yinon's Plan* merupakan dokumen yang memuat tentang strategi politik Israel untuk Timur Tengah. Poin terpenting dalam dokumen ini adalah bahwa untuk mewujudkan Israel Raya, negara-negara Arab perlu di pecah-pecah ke dalam negara-negara yang lebih kecil. Untuk bisa bertahan, Israel harus menjadi sebuah imperium kekuatan regional dengan cara pembubaran negara-negara Arab. Strategi politik luar negeri AS selama ini, terlihat sejalan dengan isi dokumen *Oded Yinon's Plan*.

Daftar Pustaka

- Agastya, M. ABM. (2013). *Arab Spring Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Ahmad, Saidiman. (2015). *Krisis Air Picu Perang Suriah*. (Online). (<http://islamlib.com/politik/dunia-islam/krisis-air-picu-perang-suriah/>., diakses 12 Desember 2016).
- Austin, Steve. (2015). *Oil Prices and The Syrian Civil War*. (Online). (<http://oil-price.net/en/articles/oil-prices-and-syrian-civil-war.php>., diakses 18 Maret 2017).
- Beauchamp, Zack. (2015). *The very simple reason why Syria's war is so hard to end*. (Online). (<http://www.vox.com/2015/2/2/7963447/syria-control-territory>, diakses 18 Maret 2017).
- Brown, M. E. (2008). *The Cause and Regional Dimension of Internal Conflict*. Dalam Alexius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- CIA. (2016). *The World Factbook, Middle East: Syria*. (Online). (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>., diakses 20 Desember 2016).
- Davison, John. (2016). *Syrian war creates child refugees and child soldiers: report*. (Online). (<http://www.reuters.com/article/us->

- [mideast-crisis-syria-children-idUSKCN0WG0R0](#), diakses 18 Maret 2017).
- Ghafur, M. F. (2015). Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Hermawan, Y. P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Islman Indonesia. (2016). *Sejken Ikatan Alumni Suriah Indonesia Angkat Bicara Soal Aleppo*. (Online). (<https://islamindonesia.id/berita/sekjen-ikatan-alumni-suriah-indonesia-angkat-bicara-soal-aleppo.htm>, diakses 18 Maret 2017).
- Kennedy, Jr. R. F. (2016). *Syria: Another Pipeline War*. (Online). (<http://www.ecowatch.com/syria-another-pipeline-war-1882180532.html?page=2>., diakses 18 Maret 2017).
- Larudee, Paul. (2015). *Mythology, Barrel Bombs, and Human Right Watch*. (Online). (<http://www.counterpunch.org/2015/07/21/mythology-barrel-bombs-and-human-rights-watch/>, diakses 18 Maret 2017).
- Mansyur, Ibnu. (2014). *Sekilas Mengenal Negara Suriah dan Jumlah Penduduknya*. (Online). (<http://www.muslimedianews.com/2014/03/sekilas-mengenal-negara-suriah-syria.html>, diakses 12 Desember 2016).
- Maupin, C. T. (2016). *The Truth About Syria: A Manufactured Against an Independent Country*. (Online). (<http://www.mintpressnews.com/truth-syria-manufactured-war-independent-country-2/216688/>., diakses 18 Maret 2017).
- Ramlan, Subakti., *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992).
- Republika. (2015). *Dr. Taufiq Ramadhan al-Buthi Konflik Suriah Konspirasi Zionis*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/12/06/nyxzib1-dr-taufiq-ramadhan-albuthi-konflik-suriah-konspirasi-zionis>, diakses 18 Maret 2017).
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sulaeman, D. Y. (2013). *Prahara Suriah (Membongkar Persekongkolan Multinasional)*. Penerbit: IIMaN Real.
- Sulaeman, D. Y. (2017). *Salju di Aleppo*. Jakarta: PT. Mitra Media Mustika & ICMES Publisher.
- University of Texas Libraries. (n.d). *Syria Maps*. (Online). (<https://www.lib.utexas.edu/maps/syria.html>, diakses 26 Maret 2017).
- Wallensteen, Peter. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: Sage.